

## INTISARI

Perhatian publik dan pemerintah saat ini tertuju pada serangkaian aksi terorisme yang semakin meningkat. Salah satu serangan yang paling mematikan adalah terorisme di bidang transportasi publik, khususnya di penerbangan sipil. Oleh karena itu, Indonesia merasa perlu untuk merancang sistematis keadaan gawat darurat bila terjadi serangan terorisme di penerbangan sipil. Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan/KEMENHUB dan Deputy Pencegahan, Deradikalisasi, dan Perlindungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT bersama-sama membentuk suatu program dan strategi anti-terorisme di penerbangan sipil nasional.

Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan adalah kualitatif. Sehingga untuk mencari data dan informasi terkait anti-terorisme di penerbangan sipil, perlu dilakukan dua teknik, yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Sedangkan dalam mengolah data, digunakan teknik data analisis naratif berikut dengan data dan kesimpulan dari penelitian. Setidaknya ada tiga pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu pejabat KEMENHUB, pejabat BNPT, dan analis Masyarakat Transportasi Indonesia.

Untuk membentuk sebuah penelitian, diperlukan sebuah teori sebagai landasan berpikir. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu *Crime Prevention Through Environmental Design/CPTED* oleh C. Ray Jeffery (1971) dan *Incident Command System/ICS theory* yang dikembangkan oleh Federal Emergency Management Agency Amerika Serikat. Dalam CPTED, dikemukakan bahwa aksi kriminal dapat ditekan dengan cara pendekatan lingkungan. Sedangkan teori ICS berpendapat bahwa dalam situasi gawat darurat, diperlukan struktur organisasi yang memuat rantai komando yang jelas agar komunikasi dan langkah penanggulangan cepat dilakukan.

Pendekatan lingkungan dilakukan dengan cara mengeluarkan sebuah SOP perlindungan dan keadaan darurat bila terjadi serangan terorisme. Sedangkan struktur organisasi khusus, yaitu KNKP/KKBU, dibentuk agar ada rantai komando yang jelas, jalur komunikasi yang terintegrasi dan memudahkan pertukaran data informasi terkait keamanan penerbangan sipil. Lebih lanjut, manajemen sumber daya manusia untuk staf penerbangan sipil dibentuk sedemikian rupa agar tercipta profesionalisme yang terhindar dari ideologi-ideologi radikalisme.

Meski demikian, masih ada beberapa ruang yang dapat dikembangkan oleh pihak-pihak terkait. Saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain, (1) perlunya melibatkan anggota masyarakat, peneliti, dan lembaga non-pemerintah dalam membentuk kebijakan keamanan penerbangan sipil, khususnya terkait terorisme. Masukan dari lapisan masyarakat ini akan berguna untuk menambah informasi atau data yang tidak ditemukan di dalam membuat kebijakan. (2) Selain itu, papan digital dan rambu-rambu keamanan di sekitar bandara harus diperbanyak guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya terorisme yang dapat menyerang kapan saja dan di mana saja.

## **ABSTRACT**

The attention of the public and the government is now focused on a series of acts of terrorism that is increasing. One of the deadliest attacks is terrorism in the field of public transportation, especially on civil aviation. Therefore, Indonesia felt the need to design a systematic emergency response in the event of a terrorist attack on civil aviation. The Directorate General of Civil Aviation, the Ministry of Transportation/KEMENHUB, and the Deputy for Prevention, Deradicalization, and Protection of the National Counter-Terrorism Agency/BNPT collectively form anti-terrorism programs and strategies in national civil aviation.

In conducting research, the method used is qualitative. To search for data and information related to anti-terrorism in civil aviation, two techniques are used, namely in-depth interview and document study. Whereas in processing data, narrative analysis technique is used along with data and conclusions from the research. There are at least three stakeholders involved in this research, namely KEMENHUB officials, BNPT officials, and analysts of the Indonesian Transportation Society.

To form a research, a theory is needed as a basis for thinking. This study uses two theories, namely Crime Prevention Through Environmental Design/CPTED by C. Ray Jeffery (1971) and the Incident Command System/ICS theory, developed by the United States Federal Emergency Management Agency. CPTED argues that criminal actions can be suppressed by environmental approach. Whereas ICS theory argues that in emergency situations, an organizational structure that contains a clear chain of command is needed so that communication and countermeasures are quickly carried out.

The environmental approach is carried out by issuing SOP for protection and emergencies in the event of a terrorist attack, in which this strategy is called external security. While the special organizational structure, namely KNKP/KKBU, is formed so that there is a clear chain of command, integrated communication lines, that facilitate the exchange of information data related to civil aviation security. Furthermore, human resource management for civil aviation staff is shaped in such a way as to create professionalism that avoids radicalism ideologies.

Nevertheless, there are still some rooms that can be developed by the relevant parties. Suggestions given in this study include, (1) the need for involvement of community members, researchers, and non-governmental organizations in shaping the policy of civil aviation security, especially related to terrorism. Input from the communities will be useful to add information or data that is not available during making policies. (2) In addition, digital boards and safety signs around the airport must be reproduced to increase public awareness of the dangers of terrorism that can strike at anytime and anywhere.